



PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2021 S / D 2026

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 -2026 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. dengan mengacu kepada Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan untuk periode 5 (tahun) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 - 2026.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 -2026 ini. Kami menyadari ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Rencana Strategis Perubahan ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Demi kesempurnaan Rencana Strategis Perubahan ini untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Paringin, 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan**



Dr. ALI HANAFI, S. Pd, M. AP
NIP. 19710228 199702 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu langkah ke depan pelaksanaan paradigma baru pemerintah menuju pemerintahan yang demokratis, tidak sentralistik, tidak otoritik, dan mengarah pada terciptanya tata pemerintahan yang baik atau Good Governance.

Otonomi daerah pada hakekatnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan inisiatif, prakarsa, dan kreatifitas serta inovasi agar sumber daya yang ada dapat dikelola sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang prima merupakan akar kebijakan pemerintah Kabupaten Balangan dalam membentuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Berangkat dari keinginan pemerintah memberikan pelayanan yang prima, maka dengan berdirinya SKPD ini cakupan beberapa pelayanan perizinan dapat dilayani pada satu tempat dengan menerapkan konsep terpadu satu pintu.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan dan pelayanan yang diinginkan masyarakat tentunya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan akan berusaha meningkatkan kinerja yang diawali dengan perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam rencana strategis.

Rencana Strategis adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, dikaitkan dengan Visi, Misi dan Nilai-nilai organisasi serta faktor-faktor kunci keberhasilan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMD kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati Balangan terpilih untuk periode tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Lembaran Negara Nomor 4663).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95).
22. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).
26. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Landasan Hukum

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra SKPD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD ini)

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki

SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan target Renstra SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan SKPD

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode 5 tahun.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi disesuaikan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD; tujuan dan sasaran SKPD

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan Strategi dan Kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada tujuan sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan

- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

Bab VIII Penutup

- Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan melayani 96 perizinan dan non perizinan meliputi 92 perizinan dan 4 non perizinan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2.1.1 Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan

produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, pengaduan, pengolahan data sistem informasi penanaman modal, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, pembinaan pelatihan kerja, produktivitas dan hubungan industrial, serta transmigrasi;
- b. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- c. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha;
- d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaduan, pengolahan data sistem informasi penanaman modal;
- e. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penempatan tenaga kerja;
- f. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan pelatihan kerja, produktivitas dan hubungan industrial;
- g. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang transmigrasi;
- h. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. **Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
 4. **Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**
 5. **Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
 6. **Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja**
 7. **Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial**
 8. **Bidang Transmigrasi**
 9. **Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
 10. **Jabatan Fungsional**

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan

- pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
-
- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
 - 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
 2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
-
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
 - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;

- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian promosi penanaman modal; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan promosi penanaman modal;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

(1) Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan berusaha I;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan berusaha II; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan perizinan non berusaha.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis pelayanan perizinan berusaha I, pelayanan perizinan berusaha II, dan pelayanan perizinan non berusaha;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha I;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan berusaha II;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan perizinan non berusaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- (1) Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengaduan dan konsultasi perizinan, data dan kearsipan perizinan serta pengelolaan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian data dan kearsipan perizinan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sistem informasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis pengaduan dan konsultasi perizinan, data dan kearsipan perizinan serta pengelolaan sistem informasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengaduan dan konsultasi perizinan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan data dan kearsipan perizinan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sistem informasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Transmigrasi

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan kawasan transmigrasi.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pembangunan kawasan transmigrasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan kawasan transmigrasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.
- (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

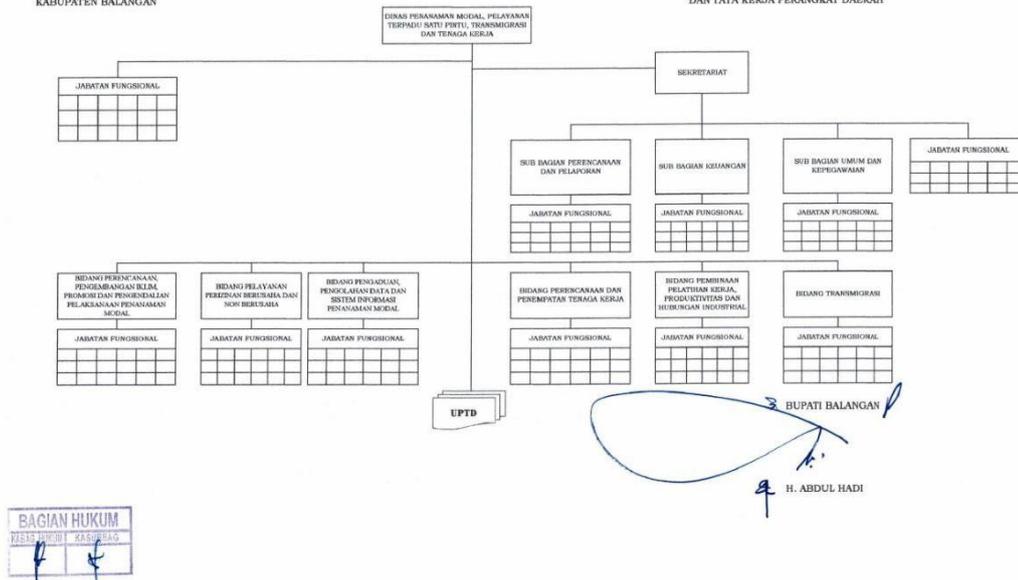
- (3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



2.2 Sumber Daya Manusia SKPD

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan (DPMPTSP) Kabupaten Balangan berjumlah 109 orang terdiri dari 48 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 61 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	8
2.	S1	37
3.	DIII	1
4.	SMA	2
5.	SMP	0

Tabel 2.2 Pendidikan Penjenjangan

No.	Jenjang	Jumlah
1.	PIM II	1
2.	PIM III	5

3.	PIM IV	11
----	--------	----

Tabel 2.3 Kepangkatan

No.	Pangkat	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	6
4.	Golongan III/d	23
5.	Golongan III/c	10
6.	Golongan III/b	7
7.	Golongan III/a	4
8.	Golongan II/d	0
9.	Golongan II/c	0
TOTAL		52

Tabel 2.4. Jabatan Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Eselon II.b	S2
2.	Sekretaris Eselon III.a	S1
3.	Kepala Bidang (Kabid) Eselon III.b	S2 = 3 S1 = 3
4.	Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Kepala Seksi (Kasi) Eselon IV.a	S2 = 3 S1 = 17
5.	Kepala UPT	D3

Tabel 2.5. Staf

	Status	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	61

Tabel 2.6 Data Aset DPMPSTSP tahun 2020

NO	ASET	SALDO (Rp)
----	------	------------

ASET TETAP		
1	Tanah	849.800.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.491.773.770,00
3	Gedung dan Bangunan	4.909.279.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.977.060,00
5	Aset Tetap Lainnya	
ASET LAINNYA		
1	Aset Lain-lain	4.991.667,00
2	Aset Tidak Berwujud	267.750.000,00
Total Aset		9.563.571.497,00

Tabel 2.7 sarana dan prasarana pendukung

No.	Nama Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	2 Buah	Baik
2.	Gedung Pelatihan/Workshop	5 Buah	Baik
3.	Aula	1 Buah	Baik
4.	Asrama	2 Buah	Baik
5.	Rumah Dinas	4 Buah	Baik
6.	Kendaraan bermotor R4	4 Buah	Baik
7.	Kendaraan bermotor R2	18 Buah	Baik
8.	Kendaraan bermotor R3	1 Buah	Baik
9.	Personal Komputer (PC)	37 Buah	Baik
10.	Laptop	42 Buah	Baik
11.	Papan Informasi	2 Buah	Baik
12.	Over Head Projector (OHP)	11 Buah	Baik
13.	Televisi	10 Buah	Baik
14.	AC	44 Buah	Baik
15.	Genset	3 Buah	Baik
16.	Printer	51 Buah	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dibentuk sebagai Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, transmigrasi dan tenaga kerja di lingkup Kabupaten Balangan. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga

Kerja Kabupaten Balangan juga berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal, dimana membentuk susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelayanan Publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Terdapat 92 jenis pelayanan perizinan dan 4 pelayanan non perizinan yang dilayani di DPMPTSP dan . Rata-rata lama penyelesaian adalah 3 (tiga) hari kerja untuk jenis perizinan. Berikut adalah daftar perizinan yang telah dilayani pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan(DPMPTSP) Kabupaten Balangan.

Tabel 2.8 Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No	Izin Berusaha	Jenis Perizinan
1.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Toko Alat Kesehatan 2. Izin Mendirikan Rumah Sakit 3. Izin Operasional Rumah Sakit 4. Izin Mendirikan Klinik 5. Izin Operasional Klinik 6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus 7. Izin Apotek 8. Izin Toko Obat 9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 10. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 11. Serifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT 12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2.	Sektor Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Pendaftaran Usaha Perkebunan 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan 5. Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan

		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pascapanen 6. Usaha Perbenihan Tanaman 7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 8. Izin Usaha Hortikultura 9. Pendaftaran Usaha Hortikultura 10. Izin Usaha Peternakan 11. Pendaftaran Usaha Peternakan
3.	Sektor Perindustrian, Mikro Kecil dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri 2. Izin Perluasan Usaha Industri 3. Izin Usaha Kawasan Industri 4. Izin Perluasan Kawasan Industri 5. Izin Koperasi Simpan Pinjam 6. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 8. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 9. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
4.	Sektor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal
5.	Sektor Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Sektor Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Izin Usaha Tanpa Pemenuhan Komitmen 3. Izin Usaha Dengan Persyaratan Teknis 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 5. Tanda Daftar Gudang
7.	Sektor Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi 2. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
8.	Sektor Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa 2. Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah

		<p>B3) Untuk Penghasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Izin Pembuangan Air Limbah <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan b. Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah 4. Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) 5. Perubahan Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL) 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
9.	Sektor Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk Swasta/ Masyarakat b. Untuk Pemerintah atau Perusahaan
10.	Sektor Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan) 2. Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan
11.	Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Daerah 2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
12.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Izin Lokasi
	Pelayanan Perizinan Non Berusaha (Melalui Aplikasi Si Cantik Cloud dan Perizinan Daerah)	
1.	Sektor Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Reklame 2. Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3. Rekomendasi Kesesuaian Lahan dan Ruang
2.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Operasional Puskesmas 2. Izin Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten 3. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

		4. Izin Optikal 5. Izin Praktik Perawat 6. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut 7. Izin Praktik Perawat Anestesi 8. Surat Izin Praktik Bidan 9. Surat Izin Praktik Apoteker 10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/SIPTTK 11. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris 12. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 13. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 14. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis) 15. Izin Praktik Okupasi Terapis 16. Surat Izin Praktik Terapis Wicara 17. Surat Izin Praktik Radiografer 18. Surat Izin Praktik Ortosis Prostesis 19. Surat Izin Praktik Dokter 20. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 21. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 22. Surat Izin Praktik Tanaga Kesehatan Tradisional 23. Usaha Depot Air Minum (DAM) 24. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga.
3.	Sektor Sosial	1. Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 3. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
4.	Sektor Pertanian	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet - Habitat Buatan - Habitat Alami
5.	Sektor Perdagangan	Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis (STPP-BOKAR SIR)
6.	Sektor Perumahan dan Permukiman	Rekomendasi Pengesahan Site Plan Perumahan
	Pelayanan Non Perizinan	
1	Layanan Informasi	

2	Layanan Pengaduan	
3	Layanan Konsultasi	
4	Layanan Penyusunan	
	Pelayanan Pendampingan NIB	

Dari 12 Bidang diatas terdapat perizinan yang ditarik pajak dan retribusinya yang mana dari pajak dan retribusi ini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.9 Perizinan yang ditarik pajak dan retribusi

No	Jenis Izin	Target	Ket.
1.	Izin Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	5.000.000,00	
Jumlah PAD		5.000.000,00	

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016 - 2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 (T-C. 23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan pada Renstra 2016-2021

No	Indikator kinerja sesuai tupoksi SKPD	Target IKK	Target Renstra SOPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke- (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional					45 Milyar	47.25 Milyar	10.064.321.000	9.396.100.000	42.882.712.314	27.988.279.555	216.466.323.218				62.20	458.13
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan				83 Nilai	83 Nilai	86 Nilai			85,13	93.00	88.50			102.57 %	112.05%	103%
3	Angka Pengangguran Terbuka		3,11%	2,80%	2,50%	2,55%		1,90%	2,34%	2,33%	2,46%		138,9%	116,43%	106,80%		
4	Persentase angkatan kerja		79,10 %	79,60 %	80,10 %	80,60 %		98,10%	97,66%	97,67%	97,54%		124,02 %	122,69%	121,94%		

	yang bekerja																
5	Angka perselisihan hubungan industrial			10 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	4 Kasus		10 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	9 Kasus		100 %	143 %	120 %	
6	Angka kecelakaan kerja			5 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus		6 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	7 Kasus		80 %	125 %	66,6 7%	
7	Pendapatan warga transmigrasi per tahun			1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.800.000		1.500.000	1.600.000	1.780.500	2.000.000		100 %	103, 23%	111, 28%	

Berdasarkan data pada tabel di atas Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM adalah sebesar Rp 216.466.323.218,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi investasinya sebesar Rp 27.988.279.555,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Disini terjadi mengalami kenaikan sebesar atau 395,95 % dari tahun 2019.

Berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM tahun 2020 sebanyak 29 pelaku usaha berarti sudah 43.28% dari total 67 pelaku usaha yang terdaftar di tahun 2020. Sedangkan realisasi investasi dari 29 pelaku usaha pada tahun 2020 sebesar Rp 216.466.323.218,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). Target pencapaian kinerja ini diambil berdasarkan hasil realisasi investasi yang sudah dilaporkan oleh pelaku usaha pada aplikasi LKPM online yang sudah disetujui oleh BKPM. Penyampaian LKPM ini dilakukan secara mandiri oleh setiap pelaku usaha setiap triwulan atau 3 bulan sekali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian realisasi investasi PMDN ini adalah sebagai berikut :

- a. PT. Surya Satria Timur yang bergerak dibidang kayu lapis telah menjual asetnya sebesar Rp. 139 milyar dan dijadikan modal tetap perusahaan. Penjualan aset ini dilakukan untuk membayar gaji karyawan sehingga menjadi realisasi investasi pada modal tetap perusahaan.
- b. Adanya perusahaan tambang yang melakukan pembebasan lahan untuk melakukan penambangan. Hal ini membuat realisasi penanaman modal pada modal tetap perusahaan menjadi lebih besar.
- c. Beberapa perusahaan yang pada tahun 2019 melakukan ijin perluasan usahanya telah melaksanakan pekerjaannya
- d. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan NIB nya pada periode pelaporan triwulan IV yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan Desember 2019 seperti CV. An Nur, CV Ulin Berseri dan, CV. Annisa Permai yang mendaftar pada

bulan Desember 2019, perusahaan ini melaporkan LKPM nya pada triwulan I tahun 2020.

- e. Strategi “Jemput Bola” (datang secara langsung ke tempat pelaku usaha) yang dilaksanakan oleh DPMPTSP dalam upayanya meningkatkan realisasi penanaman modal mempunyai dampak yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang memberikan data realisasi penanaman modalnya untuk dilaporkan dalam aplikasi LKPM Online. Hal ini dilakukan pelaku usaha karena banyak diantara pelaku usaha yang belum memahami bagaimana caranya mengoperasikan aplikasi LKPM Online tersebut.

Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi capaian investasi juga berasal dari internal organisasi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP pada tahun 2019 yang menghambat pencapaian target realisasi investasi dapat diselesaikan dan diperbaiki pada tahun 2020, kendala – kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2020 yang didapat dari Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 88,50% (A). Sedangkan untuk tahun 2019 Realisasi nilai IKM sebesar 93 % (A). Disini terjadi penurunan nilai IKM sebesar 4,5 %. Penurunan nilai IKM ini melebihi dari target Renstra DPMPTSP tahun 2016-2021 sebesar 86 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Secara keseluruhan nilai IKM ini terlihat dari unsur pelayanan sangat baik tapi masih perlu ditingkatkan dari segi pelayanan, kemampuan dari front liner Ruang pelayanan telah sesuai dengan standar nyaman dan fasilitas ruang pelayanan, telah terdapat ruang laktasi, ruang bermain anak, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan yang baik, ruang membaca, dan plakat-plakat informasi mengenai pelayanan, serta telah dilengkapi dengan fasilitas disabilitas seperti ram dan handling.

Permasalahan/Hambatan

Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengisian kuesioner indeks kepuasan masyarakat, dan sebagian ada yang tidak mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh petugas pelayanan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

1. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap perbaikan yang telah dilakukan.
2. Kinerja personil petugas pelayanan dipertahankan dengan melakukan Bimtek Excelent service dalam hal pelayanan personil sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan.

Tabel 2.11 (T-C. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan
Tenaga Kerja Kabupaten Balangan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Realisasi investasi	244,340,000	102,880,000	123,893,000	27,680,000	24,375,000	241,825,000	102,880,000	122,548,749	27,680,000	23,990,000	98.97%	100.00%	98.91%	100.00%	98.42%	114%	115%
Angka pengangguran terbuka	-	4,848,874,550	1,862,462,000	3,598,862,165	9,112,139,150	-	4,661,127,237	1,852,521,906	3,552,450,192	9,030,180,102		96.13	99.47	98.71	99.10	301%	310%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTPTK	51,100,000	37,100,000	30,365,000	40,950,000	40,300,000	51,100,000	36,910,000	29,800,000	40,800,000	40,000,000	100.00%	99.49%	98.14%	99.63%	99.26%	291%	289%

Tabel 2.12 (Formulir E.55)

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
Periode Pelaksanaan Tahun 2020

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
								I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11				13 = 6 + 12										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14=135 x100%	15	16
1	Meningkatnya Nilai Akumulabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.126.387.100,00	100%	4.501.162.186,00	100%	946.605.700,00	48,40%	199.607.112,00	33,49%	182.862.536,00	5,26%	120.930.222,00	12,85%	435.126.807,00	100,00%	938.586.677,00	100%	5.439.746.863	100,00%	88,79%	DPMP/TSP		
	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat dan kelengkapannya (lembar)	60	28.600.000,00	1.350	19.750.000,00	2.250	10.050.000,00	1.250	5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	1000	4.500.000,00	2.250	10.050.000,00	3.000	29.800.000	590,16%	104,20%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	72	529.650.000,00	48	311.303.218,00	12	99.400.000,00	3	29.646.025,00	3	23.228.036,00	3	14.099.778,00	3	24.909.738,00	12	91.863.577,00	60	403.186.795	83,33%	76,12%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	72	1.473.988.000,00	48	654.300.000,00	12	278.014.000,00	3	56.700.000,00	3	56.700.000,00	3	18.900.000,00	3	145.238.800,00	12	277.538.800,00	60	931.838.800	83,33%	63,22%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	72	230.602.000,00	48	152.102.000,00	12	15.934.300,00	3	0,00	3	7.248.900,00	3	0,00	3	8.865.400,00	12	15.934.300,00	60	168.036.300	83,33%	72,87%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (Bulan)	1482	350.579.500,00	2.319	285.566.400,00	632	34.797.200,00	200	10.723.400,00	100	9.956.100,00	0	0,00	332	14.110.300,00	632	34.769.800,00	2.951	320.336.200	197,79%	91,37%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	31.084	436.732.600,00	97.902	284.073.600,00	67.451	44.221.500,00	32.769	9.628.000,00	23.568	18.619.300,00	3.672	5.808.800,00	7.451	9.865.400,00	67.451	44.221.500,00	165.353	328.295.100	531,62%	75,17%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan)	16	128.905.000,00	105	82.707.000,00	46	15.628.700,00	30	4.691.300,00	5	2.925.900,00	0	0,00	11	8.011.500,00	46	15.628.700,00	151	98.335.700	158,95%	76,29%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (bulan)	72	53.210.000,00	48	33.260.000,00	12	4.000.000,00	3	0,00	3	2.050.000,00	3	0,00	3	1.850.000,00	12	4.000.000,00	60	37.260.000	83,33%	70,02%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	72	141.860.000,00	48	85.180.000,00	12	18.560.000,00	3	1.975.000,00	3	6.025.000,00	3	0,00	3	10.560.000,00	12	18.560.000,00	60	103.740.000	83,33%	73,13%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tetaplanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (kegiatan)	146	2.107.400.000,00	189	2.155.399.968,00	75	300.000.000,00	15	74.593.387,00	10	45.069.300,00	30	78.361.644,00	20	101.975.669,00	75	300.000.000,00	284	2.455.399.968	162,07%	116,51%	DPMP/TSP			
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Tetaplanannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah (kegiatan)	204	644.860.000,00	339	437.520.000,00	315	126.000.000,00	15	5.960.000,00	27	11.060.000,00	9	3.760.000,00	264	105.220.000,00	315	126.000.000,00	654	563.520.000	320,59%	87,39%	DPMP/TSP			
Rate-rata capaian kinerja (%)																				15752,091	494522623,9	82,39%				
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI			

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	100%	2,748,473,000.00	100%	1,672,912,860.00	100%	359,704,000.00	20.00%	37,675,200	35.56%	94,171,800.00	15.56%	16,015,000.00	28.89%	205,766,000.00	100.00%	353,628,000.00	100%	2,026,540,860	100.00%	73.73%	DPMTSP
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas (buah)	7	656,000,000.00	4	101,250,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	4	101,250,000	57.14%	15.43%	DPMTSP
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	49	97,650,000.00	49	97,650,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	49	97,650,000	100.00%	100.00%	DPMTSP
	Kegiatan Pengadaan mebelur	Tersedianya mebelur (buah)	23	180,280,000.00	37	106,480,000.00	5	33,904,000.00	0	0.00	4	1,600,000.00	0	0.00	1	32,300,000.00	5	33,900,000.00	42	140,380,000	182.61%	77.87%	DPMTSP
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor (buah)	13	62,150,000.00	10	97,510,000.00	6	36,250,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	36,200,000.00	6	36,200,000.00	16	133,710,000	123.08%	215.14%	DPMTSP
	Kegiatan Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer (buah)	19	285,400,000.00	15	231,150,000.00	10	95,900,000.00	0	0.00	3	41,478,000.00	1	4,500,000.00	6	49,922,000.00	10	95,900,000.00	25	327,050,000	131.58%	114.59%	DPMTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (bulan)	48	93,660,000.00	24	355,937,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	24	355,937,000	50.00%	380.03%	DPMTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (bulan)	72	970,033,000.00	48	460,385,860.00	12	126,650,000.00	3	32,675,200	3	29,518,800.00	3	11,515,000.00	3	52,119,000.00	12	125,828,000.00	60	586,213,860	83.33%	60.43%	DPMTSP
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	72	403,300,000.00	48	222,550,000.00	12	67,000,000.00	3	5,000,000	3	21,575,000.00	3	0.00	3	35,225,000.00	12	61,800,000.00	60	284,350,000	83.33%	70.51%	DPMTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		486.00%	29434077200.00%	101.38%	129.25%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	389,600,000.00	100%	267,000,000.00	100%	42,500,000.00	50.00%	20,000,000	0	0	0	0	50.00%	22,500,000.00	100.00%	42,500,000.00	100%	309,500,000	100.00%	79.44%	DPMTSP
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya (stall)	230	186,700,000.00	140	140,500,000.00	45	22,500,000.00	0	0	0	0	0	0	45	22,500,000.00	45	22,500,000.00	185	163,000,000	80.43%	87.31%	DPMTSP
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI (stall)	63	28,000,000.00	38	19,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	38	19,000,000	60.32%	67.86%	DPMTSP
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stall)	190	91,700,000.00	85	50,500,000.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0.00	85	50,500,000	-44.74%	55.07%	DPMTSP
	Pengadaan pakaian kederahan	Tersedianya pakaian kederahan (stall)	170	83,200,000.00	114	57,000,000.00	40	20,000,000.00	40	20,000,000	0	0	0	0	0	-	40	20,000,000.00	154	77,000,000	90.59%	92.55%	DPMTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																		115.5	77375000	69.02%	75.70%		
Predikat kinerja																		SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SEDANG	SEDANG		

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	1.236.535.000,00	100%	617.784.730,00	100%	145.000.000,00	25,00%	30.000.000,00	33,33%	42.250.000,00	0,00%	-	41,67%	72.400.000,00	100%	144.650.000,00	100%	762.434.730	100,00%	61,66%	DPMPTSP	
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan (kegiatan)	16	201.685.000,00	16	201.685.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16	201.685.000	100,00%	100,00%	DPMPTSP	
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan(OK)	72	1.034.850.000,00	74	416.099.730,00	24	145.000.000,00	6	30.000.000,00	8	42.250.000,00	0	0	10	72.400.000,00	24	144.650.000,00	98	560.749.730	136,11%	54,19%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				98	560749730	118,06%	77,09%	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	100%	258.730.000,00	100%	234.410.637,00	100%	28.173.000,00	44,44%	3.290.400,00	22,22%	11.949.600,00	0,00%	0,00	33,33%	12.833.000,00	100,00%	28.173.000,00	100%	262.583,637	100,00%	101,49%	DPMPTSP	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihstisar realisasi kinerja SKPD	Terusunnya Renja, Renja Perubahan, LAKSP, LPPD, Laporan Keuangan (dokumen)	21	194.200.000,00	11	195.930.637,00	5	14.001.000,00	3	1.495.900,00	1	4.984.100,00	0	0,00	1	7.521.000,00	5	14.001.000,00	16	209.931,637	76,19%	108,10%	DPMPTSP	
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Terusunnya RKA dan DPA DPMPTSP (dokumen)	22	64.530.000,00	14	38.480.000,00	4	14.172.000,00	1	1.794.500,00	1	6.965.500,00	0	0,00	2	5.412.000,00	4	14.172.000,00	18	52.652,000	81,82%	81,59%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				79,80%	94,85%			
Predikat kinerja																				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	TINGGI	SANGAT TINGGI	
6	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang dilindatkan/juti	100%	1.651.888.500,00	100%	430.177.154,00	100%	1.493.072.000,00	0%	-	0%	29.737.000,00	80%	143.840.700,00	20%	1.295.517.300,00	100%	1.469.095.000,00	100%	1.899.272,154	100,00%	114,98%	DPMPTSP
	Peningkatan Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terciptanya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah (MoU)	4	129.020.000,00	2	55.294.898,00	1	31.388.000,00	0	0,00	0	2.777.000,00	2	1.158.000,00	3	27.453.000,00	7	31.388.000,00	#REF!	86,672,898	#REF!	67,18%	DPMPTSP	
	Pengembangan potensi unggulan daerah	Terlaksananya Ekspose tentang Potensi Unggulan Daerah (kegiatan)	12	297.150.000,00	2	27.540.000,00	2	1.352.924.000,00	0	0,00	0	0	1	142.682.700,00	1	1.186.734.300,00	2	1.329.417.000,00	4	1.356.957,000	33,33%	456,66%	DPMPTSP	
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terusunnya RUPM dan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif Kemudahan Berinvestasi di Daerah (dokumen)	4	534.949.500,00	2	148.849.200,00	1	55.300.000,00	0	0,00	0	0	0	0	1	54.830.000,00	1	54.830.000,00	#REF!	203.679,200	#REF!	38,07%	DPMPTSP	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Pelaksanaan Pameran Investasi (kegiatan)	9	690.769.000,00	3	198.503.056,00	1	53.460.000,00	0	0,00	0	26.960.000,00	0	0	1	26.500.000,00	0	53.460.000,00	#REF!	251.963,056	#REF!	36,48%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				#REF!	149,50%			
Predikat kinerja																				#REF!	SANGAT TINGGI			

7.	Program Peningkatan Kilim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM (%)	100%	2.705.590.000,00	100%	883.310.875,00	100%	95.371.400,00	0%	0	84,62%	27.061.000,00	5,00%	0	10,38%	67175400	100,00%	94.236.400,00	100%	977.547.275	100,00%	36,13%	DPMP/TSP
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Tersedianya Draft NSPK (dokumen)	0	-	0	-	0	0,00	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%	DPMP/TSP
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terlaksananya Sosialisasi tentang Inopendi dan Kemudahan Berinvestasi (kegiatan)	1	24.450.000,00	1	24.450.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1	24.450,000	100,00%	100,00%	DPMP/TSP
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal (dokumen)	4	635.240.000,00	2	202.789.458,00	1	59.050.000,00	0	0	0	0	0	1	58.300.000,00	1	58.300.000,00	3	261.089.458	75,00%	41,10%	DPMP/TSP	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi (dokumen)	4	162.135.000,00	2	45.895.000,00	1	11.946.400,00	0	0	0	10.371.000,00	0	0	1	1.575.400,00	1	11.946.400,00	3	57.841.400	75,00%	36,67%	DPMP/TSP
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Jumlah Laporan Tim (kegiatan)	3	347.220.000,00	4	347.220.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4	347.220.000	133,33%	100,00%	DPMP/TSP	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM (Perusahaan)	40	1.067.585.000,00	31	150.228.749,00	11	24.375.000,00	0	0	11	16.690.000,00	6	0	6	7.300.000,00	23	23.990.000,00	54	174.218.749	135,00%	16,32%	DPMP/TSP
	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha di Bidang Investasi	Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang menerima sosialisasi (Pelaku Usaha)	400	468.960.000,00	303	112.727.668,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	303	112.727.668	76,75%	24,04%	DPMP/TSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			96,75%	131.489318%	99,91%	52,89%	
Predikat kinerja																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	
8	Program Penyilapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah sektor potensi sumber daya investasi (sektor)	100%	509.872.500,00	100%	285.708.700,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	285.708.700	100%	56,04%	DPMP/TSP	
	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan investasi	Dokumen Kajian Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	1	270.900.000,00	1	270.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	270.900.000	100%	100,00%	DPMP/TSP	
	Penyusunan Profil Potensi Sumber Daya Investasi	Tersedianya Dokumen Profil Investasi Kabupaten Balangan (dokumen)	4	238.072.500,00	0	14.808.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.808.700	0%	6,20%	DPMP/TSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			65	142854300	50,00%	53,10%	
Predikat kinerja																			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	RENDAH	
9	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DATA PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	683.300.000,00	100%	290.688.803,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	290.688.803	#REF!	43%	DPMP/TSP	
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online (paket)	2	568.250.000,00	2	65.111.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	65.111,071	#REF!	12%	DPMP/TSP	
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Teknologi	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan dan Pengembangan Informasi Teknologi (IT) (aplikasi)	1	17.500.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	#REF!	0%	DPMP/TSP		
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Tersedianya Bahan Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (paket)	1	107.560.000,00	1	225.577.732,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	225.577.732	#REF!	210%	DPMP/TSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			#REF!	96899267,87	#REF!	73,80%	
Predikat kinerja																			#REF!	SANGAT TINGGI	#REF!	SEDANG	

10	PROGRAM PENATAAN NSPK BIDANG PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	Sinkronisasi dan Harmonisasi NSPK	100%	340.725.000,00	100%	379.345.649,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	379.345.649	100%	111.33%	DPMP/TSP
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Naskah Akademik NSPK (NSPK)	1	206.600.000,00	1	206.049.649,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	206.049.649	100%	99.73%	DPMP/TSP
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Tertindakannya Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (kegiatan)	8	106.625.000,00	8	141.796.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	141.796.000	100%	132.99%	DPMP/TSP
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang Didokumentasikan (NSPK)	6	27.500.000,00	6	31.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	31.500.000	100%	114.55%	DPMP/TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					126448548	100,00%	115,79%		
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI	
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	110.045.000,00	100%	81.986.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	81.986.500	100%	74.50%	DPMP/TSP
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey dan Tersusunnya Dokumen IKM (dokumen)	1	30.365.000,00	1	29.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29.800.000	100%	98.14%	DPMP/TSP
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Pengaduan Masyarakat yang Ditangani dan terselesaikan (%)	100	79.680.000,00	100	52.186.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	52.186.500	100%	65.50%	DPMP/TSP
Rata-rata capaian kinerja (%)																					90	100,00%	81,82%		
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	TINGGI	
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN	100%	1.768.485.200,00	100%	381.064.433,00	100%	62.431.000,00	51.13%	19.108,000	32.25%	7.740,00	8,00%	8,42%	30.980,900,00	100%	57.828,900,00	100%	438.893,333	100,00%	24,82%	DPMP/TSP			
	Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	2200	370.669.000,00	1.087	61.930.000,00	600	37.800,900,00	386	15.000,000	222	7.740,00	223	301	15.060,900,00	1112	37.800,900,00	2.198	99.730,900	99,95%	26,91%	DPMP/TSP			
	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100	711.597.300,00	100	233.558.100,00	100	18.070.100,00	25	4.108,000	25	25	25	25	10.960,000,00	100	15.068.000,00	100	248.626.100	100,00%	34,94%	DPMP/TSP			
	Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Perizinan (Kegiatan)	5	311.874.450,00	1	84.976.333,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	84.976.333	20,00%	27,25%	DPMP/TSP		
	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Usaha	Jumlah Izin Yang diterbitkan (Buah)	100	184.234.600,00	100	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	600.000	100,00%	0,33%	DPMP/TSP			
	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Izin Tertentu	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Jasa Usaha	100	190.109.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%	DPMP/TSP			
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang harus dievaluasi (Buah)	100	193.105.400,00	50	4.700.000,00	100	6.560.000,00	13	0,00	11	0,00	44	0,00	45	4.960.000,00	113	4.960.000,00	163	9.660.000	163,00%	5,00%	DPMP/TSP		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						88,49%	15,74%		
Predikat kinerja																					TINGGI	SANGAT RENDAH			

13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	3,641,000,000.00	100%	296,030,000.00	100%	157,589,100.00	0%	0	5.56%	9,218,000.00	77.78%	0.00	17.00%	137,483,900.00	100%	146,701,900.00	100%	304,291,000	100.00%	83.6%	DPMPTSP	
	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (Dokumen)	3	340,599,000.00	1	40,800,000.00	1	40,300,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	2	80,300,000	66.67%	23.58%	DPMPTSP	
	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan (Unit)	3	466,048,000.00	1	28,800,000.00	1	5,400,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	5,400,000.00	0	5,400,000.00	1	10,800,000	33.33%	2.32%	DPMPTSP	
	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Jumlah Perizinan yang Akan Diproses Secara Online (paket)	6	508,382,900.00	2	82,490,000.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2	0	33.33%	0.00%	DPMPTSP	
	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (informasi)	13	1,035,235,600.00	1	64,875,000.00	1	27,357,700.00	0	0.00	0	9,218,000.00	0	0.00	4	16,362,500.00	4	25,580,500.00	5	52,938,200	38.46%	5.11%	DPMPTSP	
	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Naskah Akademik NSPK (NSPK)	3	711,815,500.00	0	0	1	48,000,000.00	0	0.00	0	0	0	0.00	1	39,190,000.00	1	39,190,000.00	1	87,190,000	33.33%	12.25%	DPMPTSP	
	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal (Kegiatan)	24	420,701,000.00	8	51,065,000.00	2	16,531,600.00	0	0.00	0	0	0	0.00	2	16,531,600.00	2	16,531,600.00	10	33,063,200	41.67%	7.86%	DPMPTSP	
	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang didokumentasikan (NSPK)	18	158,218,000.00	6	28,000,000.00	6	19,999,800.00	0	0.00	0	0	0	0.00	24	19,999,800.00	24	19,999,800.00	30	39,999,600	166.67%	25.28%	DPMPTSP	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				7.2857143	43470142.86	59.07%	10.91%	
Predikat kinerja																				SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	RENDAH	SANGAT RENDAH	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3,330,446,200.00	2	309,740,712.00	2	404,989,936.00	2	290,785,922.00	2	2,279,883,307	9	3,275,399,877						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																						100.00%	65.49%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 14)																						SANGAT TINGGI	RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di FTSP																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya:																								

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010 -2014, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditempuh untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG yang diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan Inpres ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan laki - laki dan perempuan dalam setiap tahapan manajemen instansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastuktur perhubungan yang responsif gender, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang Responsif Gender.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PUG adalah mata anggaran yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan perempuan dan laki- laki, yang ditunjukkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan juga telah Menyusun focal point PUG. Keberadaan Focal Point PUG sebagai implementasi dari Permendagri No. 67 tahun 2011 merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan pengarusutamaan gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Teknis penyusunan PPRG Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dilakukan melalui (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam analisa strategi yang mempengaruhi adalah analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal. Analisa lingkungan internal adalah analisis terhadap kondisi internal organisasi melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan.

Yang menjadi faktor kekuatan yang akan mendorong terhadap kondisi yang direncanakan di antaranya :

1. Kebijakan – kebijakan yang menaungi dari pusat (UU no 25 tahun 2007 dan Perka BKPM No.9 th.2012);
2. Permendagri No.20 Th.2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perda No.3 th.2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (DPMPTSP) Kab.Balangan;
3. Penduduk balangan yang masih sedikit sehingga memungkinkan pelayanan perizinan yang cepat;
4. Banyaknya serikat pekerja buruh;
5. LKS Bipartit;
6. Dewan Pengupahan;
7. Tersedianya peraturan Perundang –undangan tentang Ketenagakerjaan;
8. Tersedianya pegawai;
9. Adanya organisasi pelaksana;
10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
11. Adanya Anggaran atau Dana.

Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan yang akan menghambat terhadap kondisi yang direncanakan diantaranya :

1. Masih ada peraturan daerah tentang perizinan yang belum pas sehingga dalam pelaksanaannya masih sulit diterapkan;
2. Masih kurangnya koordinasi dengan dinas terkait;
3. Masih kurangnya promosi – promosi dalam bentuk pameran investasi;
4. Masih ada beberapa jenis perizinan yang belum dilayani di PTSP;
5. Masih kurangnya komunikasi antar Pusat dan Daerah Khususnya mengenai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Tidak memiliki Tenaga Fungsional Instruktur;

7. Kurang tersedianya infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, fasilitas informasi pasar kerja;
8. Kualitas Angkatan kerja masih rendah (Pendidikan, Keterampilan dan Kemandirian);
9. Belum memadainya jumlah pegawai pengawas Ketenagakerjaan bila dibandingkan dengan objek pengawasan yang cenderung meningkat;
10. Masih adanya kekosongan hukum pada beberapa aspek pengaturan Ketenagakerjaan;
11. Kebijakan makro yang belum diarahkan secara langsung kepada penciptaan kerja sebanyak – banyaknya, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Memperhatikan perencanaan sebagai fungsi manajerial untuk memelihara keberlangsungan dan perbaikan kinerja lembaga, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya tahun 2016-2021. Pencapaian hasil bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, pembinaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana, pendanaan, penyempurnaan manajemen dalam kurun waktu 2016-2021 menjadi modal bagi perencanaan kegiatan bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tahun 2021-2026.

Dalam kurun waktu 2016-2021 terdapat berbagai permasalahan di bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang harus diantisipasi dan diselesaikan di periode 2021-2026. Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan bidang Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan yang dihadapi

1. Pola pikir masyarakat tentang pelayanan publik yaitu tentang pungutan dan birokrasi yang buruk
2. Minat investor asing yang belum begitu besar
3. Beberapa kebijakan perizinan penanaman modal yang belum mengakomodir kebutuhan pemodal
4. Masih banyak belum dibuatnya aturan daerah sebagai turunan dari aturan pusat dalam menyikapi kebijakan perizinan di daerah.

5. Kualitas pendidikan, keterampilan dan motivasi kerja para transmigran masih rendah;
6. Kesejahteraan transmigran di unit permukiman transmigrasi binaan masih rendah;
7. Jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur masih cukup besar dan rata-rata belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.
8. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja masih rendah;
9. Lowongan kerja semakin terbatas;
10. Pemahaman dan kepatuhan pengusaha akan peraturan perundang-undangan masih rendah;
11. Pemahaman pekerja dan pengusaha akan hak dan kewajiban masih rendah;
12. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan;
13. Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah;
14. Wirausaha baru kurang berkembang;
15. Sulitnya membangun dan mengembangkan wilayah transmigrasi;
16. Sulitnya pengurusan terhadap sertifikat kepemilikan lahan transmigrasi;
17. Kurangnya data dan informasi tentang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan.

2.4.2. Peluang

1. Adanya masyarakat ekonomi asean yang mulai berlaku pada tahun 2016;
2. Adanya kewajiban daerah- daerah untuk segera mungkin menyusun RUPM berdasarkan UU 25 Tahun 2007;
3. Undang – undang no 20 tahun 2014 tentang otonomi daerah yang memberikan keleluasaan utuk mengembangkan daerah masing – masing;
4. Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap program Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan cukup tinggi;
5. Masih terbukanya kesempatan kerja, baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan juga di Luar Negeri;
6. Masih terbukanya peluang kesempatan berwirausaha;

7. Masih tersedianya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal;

8. Keinginan masyarakat ingin maju semakin meningkat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat agar tantangan yang ada dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

2.5 Faktor Kunci Keberhasilan

Dari Analisis diatas dapat dijelaskan beberapa faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Dengan Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik minat investor
2. Menerapkan SOP untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas SDM dan pendanaan untuk membuat citra pelayanan yang bersih dan profesional
4. meningkatkan disiplin aparaturnya dan membentuk struktur organisasi yang jelas untuk melaksanakan pelayanan perizinan terpadu
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait
6. Mengoptimalkan implementasi regulasi – regulasi perizinan dan penanaman modal serta mengidentifikasi dan mengajukan perbaikan regulasi terkait bagi yang belum dapat diterapkan dimasyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1.1. Permasalahan Investasi Daerah Kabupaten Balangan

Permasalahan dibidang perekonomian lainnya adalah tingkat investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Bab dua sebelumnya diketahui bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan selama lima tahun terakhir sangat berfluktuasi. Tahun 2018 merupakan tahun dimana tingkat pertumbuhan investasi di Kabupaten Balangan cukup tinggi, namun mengalami penurunan sebesar -36,56 ditahun 2019. Investasi yang berkualitas seharusnya memberikan dampak bagi kesejahteraan penduduk dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan. Investor sebaiknya diarahkan untuk berinvestasi pada sektor dengan keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi yang akan menciptakan multiplier yang besar bagi perekonomian. Hingga saat ini aktivitas investasi di kabupaten Balangan tercatat mengarah ke dua sektor utama yakni Sektor Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN).

Sebagaimana diuraikan di atas kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multipliernya rendah). Selain permasalahan kualitas investasi, permasalahan lainnya yang ada di bidang investasi adalah permasalahan kepastian hukum dan kemudahan perijinan. Berdasarkan hasil FGD diketahui bahwa belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi di Kabupaten Balangan yang menyebabkan investor masih ragu jika berinvestasi di Kabupaten Balangan karena tidak adanya kepastian hukum. Untuk perijinan sendiri, hampir sebagian besar tidak ada biaya perijinan dan jangka waktu pembuatan perijinan maksimal lima hari, tergantung dari dinas teknisnya. Permasalahan berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Balangan Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing. Selain itu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik maka DPMPPTSP perlu membuat Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah :

1. Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
2. Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi).
3. Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing.
4. Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Tabel 3.1 (T-B.35.)

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya dan kurang berkembangnya sektor ekonomi non tambang (ekonomi lokal)	Pertumbuhan Investasi yang Berfluktuasi dan Kualitas Investasi yang belum optimal	Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
			Belum ada Peraturan Daerah yang membahas mengenai investasi (Kepastian Hukum Investasi)
			Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing
			Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

3.1.2. Permasalahan Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Ketransmigrasian dan ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat luas cakupannya. Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan tenaga kerja.

Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Balangan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institute yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran, perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Perlu dilakukan iklim investasi yang kondusif untuk bisa membuka dan memperluas lapangan pekerjaan.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja) merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Para pencari kerja yang tidak memiliki keterampilan dan kurang berkompetensi di dunia kerja masih cukup tinggi. Ke depan BLK diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan (Three in one).

Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

Pada akhirnya pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Di sini dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam pembangunan Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan kaitan dengan tugas dan fungsi , yaitu :

1. Lahan yang diberikan kepada warga transmigran kurang layak;
2. Masih tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal;

3. Masyarakat transmigran sebagian besar belum mandiri secara ekonomi;
4. Sulitnya memenuhi persyaratan untuk pengembangan kawasan transmigrasi baru;
5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
6. Masih kurangnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan masyarakat;
7. Kesempatan kerja / lapangan pekerjaan yang terbatas;
8. Pendidikan dan keterampilan angkatan kerja masih rendah;
9. Pendidikan dan keterampilan yang ada belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia.
10. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
11. Masih kurangnya sarana prasarana pelatihan;
12. Masih kurangnya pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan;
13. Masih adanya perusahaan yang belum mentaati peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja;

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat.
2. Kurangnya sarana prasarana, peralatan praktek pada bidang-bidang juga di BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
3. Kualifikasi Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan pasar kerja;
4. Produktivitas tenaga kerja kurang diperlukan program pelatihan secara berkelanjutan;

3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indicator-indikatornya.

3.2.1. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Balangan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”.

Makna dari Visi tersebut adalah :

1. Membangun Desa, yakni mengembangkan kawasan pedesaan dan konektivitasnya di Kabupaten Balangan.
2. Menata Kota, yakni menata kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan.
3. Maju dan dan Sejahtera, yakni mewujudkan dan meningkatkan IPM di Kabupaten Balangan.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Balangan dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sesuai dengan misi kedua yaitu :

“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”

Misi ini dilandasi oleh kondisi perekonomian daerah Balangan yang masih didominasi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata masih sangat terbatas. Hal ini mengharuskan daerah berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Dan Misi keempat yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”

Misi ini di landasi kondisi masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Balangan sehingga mengharuskan daerah untuk meningkatkan IRB dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

3.3 Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2021 – 2026

Sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Balangan di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yaitu dengan memprioritaskan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka “, maka dapat ditarik benang merah bahwa peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan mempunyai peran yang cukup penting dan strategis dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati, yaitu meningkatkan nilai investasi penanaman modal dan mewujudkan Tenaga Kerja yang terampil untuk bersaing pada pasar kerja dan mensejahterakan masyarakat di kawasan transmigrasi dan meningkatkan PAD.

3.4 Telaahan Renstra

1. Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020 – 2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengacu pada arah kebijakan RPJMD 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif.
3. Mengacu pada arah kebijakan RPJPD yaitu Mewujudkan ketahanan ekonomi dengan berbasis kerakyatan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang sejahtera, mandiri dan berkelanjutan, dengan didukung oleh

Sumber Daya Alam yang tersedia, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang didukung SDM yang handal.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman, dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan;
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana;
4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten;
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional;
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Berdasarkan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Balangan dalam naskah Rencana Umum Penanaman Modal maka terlihat pada sektor perekonomian terdapat kawasan perdagangan dan jasa, hubungannya dengan investasi adalah tersedianya lahan untuk usaha dan perdagangan di kota paringin salah satunya tumbuhnya investor untuk toko modern yaitu investor alfamart 1 buah pada 2016 dan 1 buah lagi di 2017 di batu piring paringin.

Dari sektor perkebunan sasaran investasi adalah investor untuk perkebunan karet, serta dengan diaturnya dalam RTRW untuk kawasan pemukiman dapat menjadi sasaran untuk investasi dalam pembangunan perumahan yang setiap tahun terus meningkat.

Sektor- sektor yang menjadi fokus pada 5 tahun kedepan berdasarkan RTRW Kab.Balangan adalah :

1. Sektor perdagangan dan jasa (toko modern)
2. Sektor Pemukiman (perumahan)
3. Sektor Perkebunan (perkebunan Karet)
4. Sektor sosial (kawasan cagar budaya dan objek wisata di beberapa kecamatan)

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengacu kepada rencana tata ruang dan wilayah. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Balangan, yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Balangan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Sejauh ini belum ada aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Secara tidak langsung Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali, agar arah Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat tepat sasaran.

Untuk pembangunan bidang Ketransmigrasian, kawasan transmigrasi pada hakekatnya merupakan kawasan pemukiman dengan kegiatan bidang pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan maupun kehutanan serta kegiatan usaha ekonomi lainnya, sehingga di dalam pemetaan wilayahnya juga belum diatur secara khusus.

3.6 Penentuan Isu- Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, karena tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (Lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.
6. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dengan meningkatkan Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016-2021, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Ketidakesesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;

3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Terbatasnya lokasi transmigrasi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Strategis dapat ditempuh melalui :

1. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing;
3. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja dan peningkatan Penempatan bagi pencari kerja;
4. Meningkatkan kesempatan kerja terutama di sektor informal serta dan mendorong produktivitas;
5. Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah;
6. Meningkatkan Perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan kepesertaan jamsostek;
7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan Bimtek Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan Kelembagaan Bipartid dan penetapan upah minimum;
8. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan, dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan harmonisasi hubungan kerja.
9. Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis ditentukan strategi:

1. Meningkatkan Keterampilan dan Produktivitas Pencari kerja Merupakan strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan strategis, dalam kenyataan bahwa tingkat keterampilan dan keahlian para pencari kerja di Kabupaten Balangan ini masih relatif kurang, hal ini dibuktikan dalam perebutan peluang pasar kerja di sektor formal sedikit sekali yang terserap oleh karena demikian dalam hal

penempatan tersebut tidak hanya di sektor formal saja tapi harus diimbangi melalui penempatan sektor informal dan pembentukan Usaha Mandiri, untuk menjangkau kondisi yang demikian tersebut diawali pemberian pelatihan-pelatihan terhadap penguasaan salah satu penerapan teknologi.

2. Meningkatkan Pendayagunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja Strategi untuk pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja berkaitan erat dengan percepatan serta pemerataan pembangunan, selaras dengan fungsi tata ruang, untuk hal tersebut perlu didukung oleh ketersediaan tenaga kerja yang produktif baik dari segi kualitas dan kuantitas sehingga akan terhindar atau paling dapat dibatasi penumpukan tenaga kerja di satu tempat, sementara di tempat lain kekurangan tenaga kerja.
3. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja
Salah satu masalah yang di hadapi terjadinya penganggur dikarenakan kurang baik dan sempurnanya sistem informasi pasar kerja terutama informasi mengenai lowongan kerja, untuk mengatasi hal seperti demikian maka strategi yang harus ditempuh adalah menyempurnakan sistem informasi pasar kerja dengan pengembangan luas cakupan sebarannya dengan memanfaatkan media yang paling banyak dimanfaatkan oleh pencari kerja melalui media Bursa Kerja Online.
4. Meningkatkan Ketenangan dan Kemajuan Berusaha
Sebagai pelaku ekonomi perusahaan swasta memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu ketenangan dalam berusaha bagi pengusaha adalah ketenangan bekerja bagi pekerja mutlak dibutuhkan untuk itu perlu diambil strategi kebijakan melalui perwujudan hubungan kerja yang serasi, harmonis dan dinamis. Untuk mencapai itu, semua yang harus di tempuh adalah melaksanakan secara bersungguh-sungguh semua hak dan kewajiban masing-masing antar pekerja dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi bimbingan teknis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran dalam penerapan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif dan Misi IV yaitu Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Tujuan SKPD hasil penyesuaian Renstra Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan dengan Indikator Persentase peningkatan nilai Investasi Daerah.
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Untuk mewujudkan tujuan SKPD diatas disusun Sasaran Strategis SKPD sesuai hasil rewiu Penyesuaian Renstra 2021 s.d 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
3. Meningkatkan kemudahan berinvestasi
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Sasaran strategis diatas diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Nilai realisasi investasi
2. Persentase tenaga kerja yang terserap
3. Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB)
4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi

Adapun yang berkaitan dengan Tujuan SKPD, Sasaran beserta Indikator Kinerja Utama berdasarkan Penyesuaian Renstra periode 2021 s.d 2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatkan realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400 M	600 M	610 M	615 M	620 M	620 M
		Meningkatkan kemudahan berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Nilai			69,6	70,5	71	71,5	72
2.	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	%i	60%	65%	65%	70%	75%	80%	80%
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	%			90%	95%	95%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha
2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan
3. Meningkatkan tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing.
4. Meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja
5. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta dan mendorong produktivitas
6. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa
7. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha.

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan promosi dan pengawasan investasi penanaman Modal asing dan dalam negeri
2. Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan penerima tenaga kerja
4. Melakukan kerjasama dengan SKPD teknis dalam rangka pelatihan-pelatihan di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya
5. Melakukan sosialisasi tentang ketenagakerjaan dan peningkatan kreativitas dan produktivitas LPK
6. Menyederhanakan prosedur perizinan
7. Mempersingkat waktu pelayanan
8. Mengoptimalkan pelayanan perizinan berbasis online

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan penjelasan terhadap strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat sebagai berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada periode renstra 2016 – 2021 ada beberapa 12 program dan 22 kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha
- 2) Pengawasan Penanaman Modal
- 3) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

7. Program Perencanaan Tenaga Kerja

A. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Sub Kegiatan

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 2) Fasilitasi Penyusunan Tenaga Kerja Mikro

8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Sub Kegiatan

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
- 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- 4) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

B. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Sub Kegiatan

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

C. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Sub Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

D. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

9. Program Penempatan Tenaga Kerja

A. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pelayanan antar Kerja
- 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 4) Perluasan Kesempatan Kerja

10. Program Hubungan Industrial

A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- 2) Pengesahan Peraturan Perusahaan
- 3) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

B. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1) Penyuluhan Transmigrasi

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

A. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Sub Kegiatan

- 1) Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
- 2) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman

6.2 Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang telah dirumuskan disajikan menggunakan Tabel TC. 27 (Terlampir).

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 s.d 2026

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan program prioritas dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Ada 3 Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Murni, Dana Alokasi Khusus non fisik Sub Kegiatan tersebut melibatkan Narasumber dari BPKPM, DPMPTSP Prov. Kalsel, serta peserta dari SKPD lain, pihak ketiga dan pelaku usaha.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan rencana 5 (Lima) tahun yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan juga Prioritas maupun tujuan dan sasaran secara terukur yang bertujuan untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban dan juga sebagai pedoman dalam melaksanakan Program tahunan sampai lima tahun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang saat ini dan memprediksikannya pada keadaan yang akan datang.

Untuk dapat melihat Indikator Kinerja yang ada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut di atas, maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 :

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400 M	600 M	610 M	615 M	620 M	620 M
Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Nilai	60%	65%	65%	70%	75%	80%	80%
Persentase Tenaga Kerja yang Tersempai	%i			69,6	70,5	71	71,5	72
Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	%			90%	95%	95%	100%	100%

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang

terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

BAB VIII.

PENUTUP

Penyesuaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2026 adalah Rencana Kerja dalam jangka pendek maupun jangka menengah serta dalam rangka mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi pengembangan sektor penanaman modal, ketransmigrasian dan ketenagakerjaan Kabupaten Balangan.

Untuk mendukung rencana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Kerja telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan penjabaran visi dan misi pengembangan sektor penanaman modal, ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400 M	600 M	610 M	615 M	620 M	620 M
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	%	60%	65%	65%	70%	75%	80%	80%
2.	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	Nilai			69,6	70,5	71	71,5	72
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	%			90%	95%	95%	100%	100%

Mengetahui :

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda/Ivc
NIP. 19710228 199702 1 002

Paringin, September 2023

Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan :

1. Ketua Tim

Abdul Basyid, S.Sos, M.AP

2. Anggota

Rafiul Amal, M.Pd

3. Anggota

Baidhawi, SE

4. Anggota

Fitri Efendi, S.Pd, MM

BERITA ACARA
HASIL PENYESUAIAN RENSTRA DAN IKU TERHADAP
PENYUSUNAN POHON KINERJA DAN CASCADING SECARA LOGICAL FRAMEWORK
DAN
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
SESUAI KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRAI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 800/020 /DPMPTSPTTK-Blg/TAHUN 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan September Tahun 2023, kami Tim Reviu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Nomor : 188.45/ / /SK/DPMPTSPTTK-BLG/2023 Tanggal 04 September 2023, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan 2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan

<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka
--

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (sebelum reviu)	TUJUAN (setelah reviu)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka

II. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan	1. Meningkatnya investasi daerah
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka	2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
3. Meningkatnya kemudahan berinvestasi
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (sebelum reviu)	SASARAN (setelah reviu)
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka (TPT)	2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	3. Meningkatnya kemudahan berinvestasi
	4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

III. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Realisasi investasi
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka	2. Angka pengangguran terbuka
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja

1. Nilai realisasi investasi
2. Persentase tenaga kerja yang terserap
3. Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB)
4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi investasi 2. Angka pengangguran terbuka 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi investasi 2. Persentase tenaga kerja yang terserap 3. Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB) 4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya investasi daerah 2. Menurunnya angka pengangguran terbuka 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi investasi 2. Angka pengangguran terbuka 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi investasi 2. Persentase tenaga kerja yang terserap 3. Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB) 4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi
--

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi investasi 2. Angka pengangguran terbuka 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPTTK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi investasi 2. Persentase tenaga kerja yang terserap 3. Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB) 4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi

V. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
Realisasi investasi	Untuk mengetahui realisasi investasi PMDN per tahun	Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Sumber data diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya
Angka pengangguran terbuka	Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka (TPT) per tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didapat dari Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%	Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP/PTTK	Untuk mengetahui sejauhmana layanan atau kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan, display touch screen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SMS Gateway - Disediakan aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan 	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS

1. Jumlah angka realisasi investasi PMDN dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun
2. Penduduk yang bekerja / Angkatan Kerja x 100 %
3. Nilai Survey kepuasan terhadap layanan Perizinan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun
4. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar (PU atau BPU) x 100%

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun	Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya
Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	Mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan Tenaga Kerja	PYB/AK x 100 %	Database Ketenagakerjaan
Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam berinvestasi di Kabupaten Balangan	Nilai Survey kepuasan terhadap layanan Perizinan	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	Adanya indicator ini untuk mengetahui sejauhmana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan terlindungi sesuai dengan hak hak nya.	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar (PU atau BPU) x 100%	Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan

VI. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja(IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Realisasi investasi	Rp	216,47 M	227,29 M	238,65 M	250,59 M	263,12 M	276,27 M	276,27 M
2. Angka pengangguran terbuka	%	2,46%	2,46%	2,43%	2,40%	2,37%	2,34%	2,34%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSPPTK	Nilai	88,50	87	87,50	88	88,50	89	89

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Taget Kinerja Sasaran agar disesuaikan dengan indikator kinerja sasaran yang telah direview yang sudah sinkron dengan visi, misi, tujuan dan sasaran

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400 M	600 M	610 M	615 M	620 M	620 M
2. Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	%	60%	65%	65%	70%	75%	80%	80%
3. Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Nilai			69,6	70,5	71	71,5	72
4. Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	%			90%	95%	95%	100%	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA**

Jl. Jend. A. Yani Km.1 Paringin Kota – Kabupaten Balangan Kode Pos 71611
Telp/Faks. (0526) 2028114 email : dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.46/069 / SK / DPMPSTPTTK / TAHUN 2023

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.46/033/SK/DPMPSTPTTK/TAHUN 2021 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 01 September 2023

KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
 DAN TENAGA KERJA
 NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-BLG/TAHUN
 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
 KINERJA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
 TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	<p>Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)</p> <p>Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun</p> <p>Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya</p>	Kepala SKPD	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terserap	<p>Mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan Tenaga Kerja</p> <p>$PYB/AK \times 100 \%$</p>	Kepala SKPD	Database Ketenagakerjaan

3	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam berinvestasi di Kabupaten Balangan Nilai Survey kepuasan terhadap layanan Perizinan	Kepala SKPD	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	Adanya indicator ini untuk mengetahui sejauhmana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan terlindungi sesuai dengan hak hak nya. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar (PU atau BPU) x 100%	Kepala SKPD	Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN
BALANGAN,



Dr. AKHRIANI, S.Pd.,M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 BALANGAN
 NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-
 BLG/TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
 KINERJA SKPD PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026 SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Untuk mengetahui Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Bidang Sekretariat	LHE Sakip
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Untuk mengetahui sejauhmana kondisi sarana dan prasarana penunjang SKPD		Data Aset

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	Mengetahui sejauhmana permintaan tenaga kerja / lowongan kerja dapat dipenuhi Jumlah lowongan yang terpenuhi/Jumlah lowongan terdaftar x 100%	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi Pasar Kerja

2	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru	Mengetahui sejauhmana dampak realisasi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baru Jumlah Tenaga Kerja Baru berdasarkan rilis LKPM	LKPM
---	---	--	---	------

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi Tahun N / Jumlah Tenaga kerja Terdaftar (Peserta pelatihan dan Layanan Antar Kerja) Tahun N x 100%	Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	<p>Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan</p> <p>dengan Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan maka kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar</p> <p>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi _____ X 100</p> <p>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan tercatat</p>		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Warga Transmigrasi yang Terampil	Persentase warga Transmigrasi yang Terampil	$\frac{\text{Jumlah Warga yang terampil}}{125 \text{ Orang}} \times 100\%$	Bidang Transmigrasi	
2	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh Warga Transmigrasi	$\frac{LK}{LT} \times 100\%$		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal / Jumlah Permintaan data dan informasi yang terpenuhi x 100%	Bidang Pengaduan, Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	Mengetahui sejauhmana tindaklanjut atas pengaduan yang masuk Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang terselesaikan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	Mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	Mengetahui sektor investasi baru yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan iklim investasi	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen Potensi
2	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Mengetahui sejauhmana minat investasi/rencana investasi di Kabupaten Balangan Nilai Persetujuan Investasi dari pendaftaran NIB		Data NIB/ Perizinan Berusaha
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajibanya Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM/ Jumlah Pelaku usaha yang wajib melaporkan x 100%		LKPM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Umum & Kepegawaian	SILKA
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik			
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan			
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Keuangan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	Mengetahui jumlah layanan izin yang terintegrasi secara online	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha	
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan		
3	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Non Berusaha)	Jumlah izin seusi SOP/ Jumlah permohonan perizinan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Perizinan, Jumlah Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Pengaduan yang tertangani	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan dan Non Perizinan PM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Mengetahui progress data dan informasi penanaman modal	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terpenuhi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / Jumlah permintaan data dan informasi x 100%	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Mengetahui Jumlah data dan informasi perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (berinvestasi)	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Data Izin
2	Tersedianya Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi	Mengetahui Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	Mengetahui jumlah dokumen promosi penanaman modal	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Promosi Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Mengetahui jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penyusunan LKPM	Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Pengawasan Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Perusahaan/ Pemberi Kerja dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak / Jumlah Perusahaan terdaftar x 100%	Sub Koordinator Hubungan Industrial	WLKP
2	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perkara/Pengaduan HI yang difasilitasi Penyelesaiannya	Jumlah perkara yang difasilitasi / Jumlah perkara masuk x 100%		HI

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya LPKS yang Berkualitas	Jumlah LPKS yang melaksanakan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Mengetahui Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan	Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Kelembagaan	
2	Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas Wirausaha Kecil	Jumlah Wirausaha yang meningkat produktivitasnya / Jumlah Wirausaha binaan x 100%		
3	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	Mengetahui jumlah tenaga kerja yang kompeten berdasarkan hasil Sertifikasi BNSP		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan	Jumlah IPK yang disebarluaskan / Jumlah Lowongan terdaftar x 100	Sub Koordinator Penempatan Tenaga	

2	Tersedianya LPTKS yang Berperan Menyalurkan Tenaga Kerja	Persentase LPTKS yang Aktif	Jumlah LPTKS yang melakukan rekrutmen / Jumlah LPTKS Terdaftar x 100%	Kerja	
3	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Persentase Kerjasama antar Kerja	Jumlah perusahaan yang difasilitasi / Jumlah Perusahaan yang menyampaikan lowongan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	Jumlah kesempatan kerja / Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	banyaknya warga transmigrasi yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan	Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

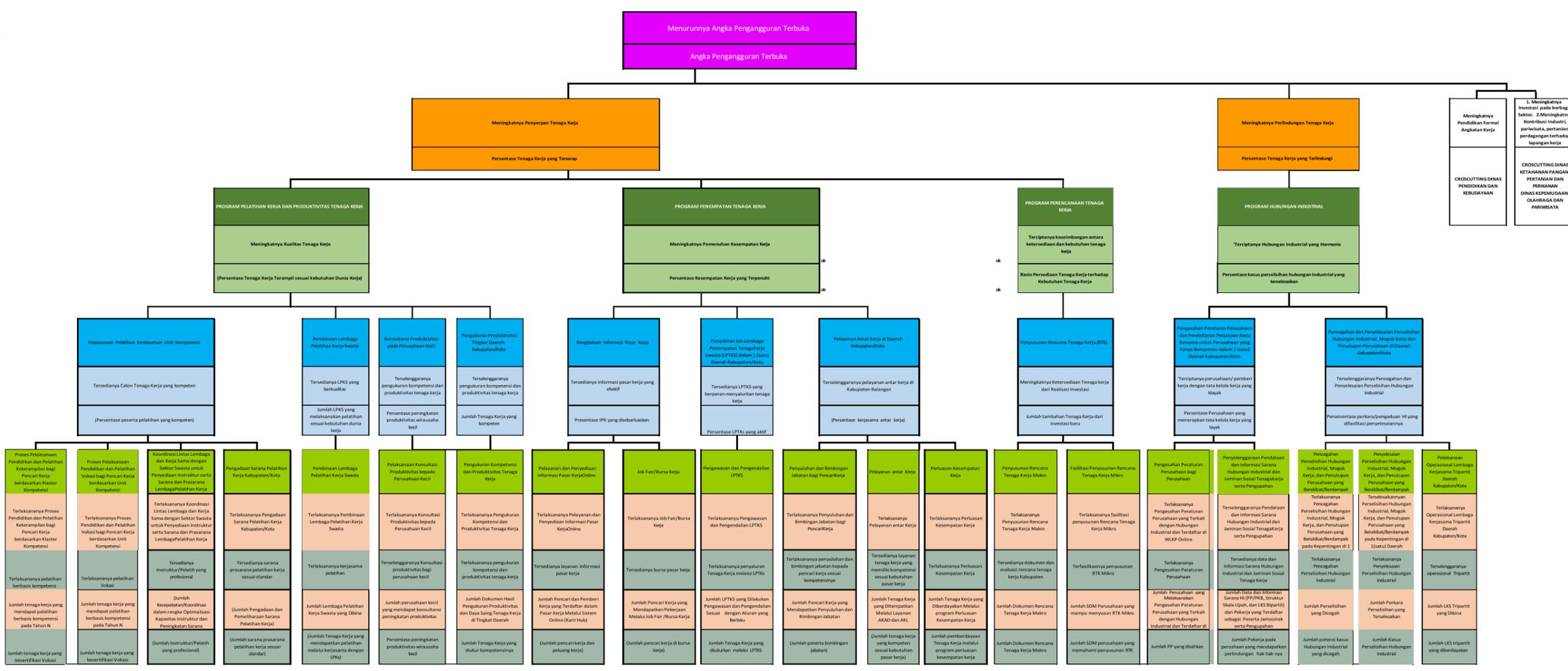
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN,


Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 19740228 199702 1 002

Terdapatnya Investasi Daerah yang Berkelanjutan	Penerapan Kebijakan Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Potensi Investasi	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 kerjasama		2 kerjasama		2 kerjasama		100%	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	100%	144.404.700,00	100%	158.845.170,00	100%	174.729.887,00	100%	890.626.527,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
										100%	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah																
				2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Potensi Investasi	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	100%	144.404.700,00	100%	158.845.170,00	100%	174.729.887,00	100%	890.626.527,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
				2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Potensi Investasi	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	1 Potensi Investasi Daerah	100%	144.404.700,00	100%	158.845.170,00	100%	174.729.887,00	100%	890.626.527,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja							
				2	18	02	Z.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PERDA/Perbup mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1 draft Perbup	1 Perbup																	
				2	18	02	Z.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berusaha (Berinvestasi)																				
				2	18	02	Z.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0,00	1 draft SOP	1 draft SOP	36.300.000,00															
				2	18	02	Z.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					1 Dokumen	57.850.100,00	1 Dokumen	63.635.110,00	1 Dokumen	69.998.621,00	5 dokumen	280.374.831,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.01	03	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		1 laporan monitoring Evaluasi	0,00	1 laporan monitoring Evaluasi															
				2	18	02	Z.01	03	Fasilitasi Komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Komitmen antara Uluha Besar (PSA/PMDN) dengan UMK di daerah					1 Mu	55.000.000,00	1 Mu	60.500.000,00	1 Mu	66.500.000,00	3 Mu	232.050.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pertumbuhan Potensi Investasi	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen Peta Potensi																
				2	18	02	Z.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Review Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 Dokumen Review RUPM	219.200.000,00	1 Dokumen Review RUPM	11.850.000,00														
				2	18	02	Z.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Daerah (Peta) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	15.125.000,00		16.637.500,00		18.301.250,00	1 Dokumen	294.863.750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.02	03	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dokumen Peta Potensi	0,00	1 Dokumen Peta Potensi	14.220.000,00														
				2	18	02	Z.02	03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Terlaksananya data potensi investasi daerah yang dimutakhirkan					1 Potensi	16.429.600,00	1 Potensi	18.072.560,00	1 Potensi	19.879.816,00	6 Dokumen Peta Potensi	63.537.970,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.01	01	Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 kegiatan	#REF!	4 Kegiatan	#REF!	4 Kegiatan	#REF!	4 Kegiatan	#REF!											
				2	18	02	Z.01	01	Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pemasaran Investasi					1 Laporan	220.000.000,00	1 Laporan	242.000.000,00	1 Laporan	266.200.000,00	1 Laporan	728.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		0,00	2 Kegiatan	16.850.000,00															
				2	18	02	Z.01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	110.000.000,00	1 Dok	121.000.000,00	4 Dok	331.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
				2	18	02	Z.01	03	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal	3 kegiatan	0,00	2 kegiatan	48.990.000,00															
				2	18	02	Z.01	03	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					1 Dok	120.000.000,00	1 Dok	132.000.000,00	1 Dok	145.200.000,00	4 Dok	397.200.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja						

Memajukan Pelayanan Perizinan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Perentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	62.720.000,00	100%	133.400.000,00	100%	132.774.500,00	#REF!	#REF!	#REF!	100%	836.798.724,50	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat								85	87	83					
									Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	100%	62.720.000,00	100%	133.400.000,00	100%	132.774.500,00	#REF!	#REF!	#REF!	100%	836.798.724,50	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
									Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Perentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP							100%								
									Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah peneltian perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%		0,02	650 bn	14.000.000,00	700 bn	14.700.000,00					100%	82.222.700,00	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
									Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Perentase bn yang diwakili	100%	100%	5.240.000,00	100%	22.490.000,00	100%	23.630.000,00					100%	127.438.500,00	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
									Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Perentase konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%	40.300.000,00	100%	62.050.000,00	100%	51.765.000,00								Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
									Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	17.180.000,00	100%	44.860.000,00	100%	42.640.500,00		46.904.500,00		51.595.000,00	56.754.005,00	3750 bn	259.934.960,50	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
									Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Risiko Tertinggi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							700 pelaku Usaha	16.170.000,00	700 pelaku Usaha	17.787.000,00	700 pelaku Usaha	19.565.700,00	3000 pelaku Usaha	53.522.700,00	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
									Penyediaan dan pengelolaan Layanan kepada perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terbelainya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							50 pelaku Usaha	56.941.500,00	50 pelaku Usaha	62.635.650,00	50 pelaku Usaha	68.899.215,00	150 pelaku Usaha	332.591.365,00	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja
									Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha							700 pelaku Usaha	26.002.900,00	700 pelaku Usaha	26.403.190,00	700 pelaku Usaha	31.463.509,00	1000 pelaku Usaha	190.750.000,00	Divisi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Cascading Angka Pengangguran Terbuka



<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi</p> <p>Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi</p> <p>Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N</p>	<p>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p>Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p>Terlaksananya pelatihan vokasi</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N</p>	<p>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Pemetaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga/Pelatihan Kerja</p> <p>Terlaksananya Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk pemetaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga/pelatihan kerja</p> <p>Tersedianya Instruktur/Pelatih yang profesional</p> <p>Jumlah Instruktur/Koordinator dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana</p> <p>Jumlah Instruktur/Pelatih yang profesional</p>	<p>Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</p> <p>Terlaksananya Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</p> <p>Tersedianya sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar</p> <p>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</p> <p>Jumlah sarana prasarana pelatihan kerja sesuai standar</p>	<p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p>Terlaksananya kerjasama pembinaan</p> <p>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui kerjasama dengan LPKS</p>	<p>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</p> <p>Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</p> <p>Terselenggaranya Konsultasi produktivitas bagi perusahaan kecil</p> <p>Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas</p> <p>Persentase peningkatan produktivitas perusahaan kecil</p>	<p>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Terlaksananya pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang diukur kompetensinya</p>	<p>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</p> <p>Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</p> <p>Tersedianya layanan informasi pasar kerja</p> <p>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari Hub)</p> <p>Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja</p>	<p>Job Fair/Bursa Kerja</p> <p>Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja</p> <p>Tersedianya bursa pasar kerja</p> <p>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</p> <p>Jumlah pencari kerja di bursa kerja</p>	<p>Pengawasan dan Pengendalian LPKS</p> <p>Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPKS</p> <p>Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian LPKS</p> <p>Jumlah LPKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang diakukan melalui LPKS</p>	<p>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</p> <p>Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</p> <p>Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja sesuai kompetensinya</p> <p>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</p> <p>Jumlah pencari kerja yang mendapat bimbingan jabatan</p>	<p>Posyapan antar Kerja</p> <p>Terlaksananya Posyapan antar Kerja</p> <p>Tersedianya layanan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</p> <p>Jumlah tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja</p>	<p>Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Terlaksananya Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Jumlah Tenaga Kerja yang Dibandarkan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</p> <p>Jumlah pemberdayaan Tenaga Kerja melalui program perluasan kesempatan kerja</p>	<p>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</p> <p>Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</p> <p>Tersedianya dokumen dan evaluasi rencana tenaga kerja Kabupaten</p> <p>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</p> <p>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</p>	<p>Facilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</p> <p>Terlaksananya Facilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</p> <p>Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</p> <p>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</p> <p>Jumlah SDM perusahaan yang memahami penyusunan RTK</p>	<p>Pengolahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</p> <p>Terlaksananya Pengolahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</p> <p>Terlaksananya Pengolahan Peraturan Perusahaan</p> <p>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan</p> <p>Jumlah PP yang diakukan</p>	<p>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</p> <p>Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</p> <p>Tersedianya data dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</p> <p>Jumlah Pekerja pada perusahaan yang mendapatkan perlindungan hak hak nya</p>	<p>Pencegahan Persepsi Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakut/Berdampak</p> <p>Terlaksananya Pencegahan Persepsi Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakut/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah</p> <p>Terlaksananya Pencegahan Persepsi Hubungan Industrial</p> <p>Jumlah Persepsi Hubungan Industrial yang Dicegah</p> <p>Jumlah potensi kasus Hubungan Industrial yang dicegah</p>	<p>Penyediaan Persepsi Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakut/Berdampak</p> <p>Terselenggaranya Pencegahan Persepsi Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakut/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Persepsi Hubungan Industrial</p> <p>Jumlah Persepsi Hubungan Industrial yang dicegah</p> <p>Jumlah Kasus Persepsi Hubungan Industrial</p>	<p>Delaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Terselenggaranya operasional Tripartit</p> <p>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</p> <p>Jumlah LKS tripartit yang diberdayakan</p>
---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	---	---	---	--	--	---

Meningkatnya Pendidikan Formal Angkatan Kerja

1. Meningkatkan Investasi pada berbagai Sektor, 2. Meningkatkan Kontribusi Industri, perikanan, pertanian, perdagangan terhadap lapangan kerja

CROSCUTTING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

CROSCUTTING DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS KEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Pohon Kinerja Realisasi Investasi

